



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Menuju Sistem Registrasi Tunggal Untuk Perlindungan Sosial

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan dan Program Perlindungan Sosial untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan

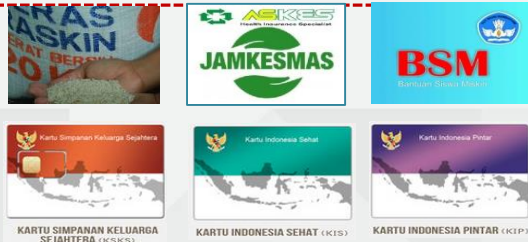


Kebijakan dan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal dan lain-lain

Menurunkan Beban Pengeluaran

- Program Perlindungan Sosial



Meningkatkan Pendapatan

- Pemberdayaan masyarakat
- Dukungan pengembangan usaha mikro (KUR)
- Pelatihan kerja (BLK)
- Pendampingan usaha sektoral (KUBE)

BDT sebagai Instrumen Utama

Penanggulangan Kemiskinan



Pengelolaan Basis Data Terpadu

Kilas Balik Pengembangan Basis Data Terpadu



Perbaiki Metodologi Pengumpulan Data:

- Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs. 29% pada tahun 2008).
- Penggunaan sensus penduduk sebagai *starting point*.
- Pelibatan komunitas miskin.
- Variabel yang dikumpulkan lebih banyak → Prediksi rumah tangga miskin lebih baik.

Perbaiki Metodologi Pemeringkatan:

- Perbaiki metode *Proxy Mean Testing* (PMT).

Pengelolaan **Basis Data Terpadu** Untuk Program Perlindungan Sosial

Dikelola oleh **UNIT PENETAPAN SASARAN NASIONAL**,
di bawah Sekretariat TNP2K dengan 3 (tiga) tugas utama:

1

*Menyediakan
layanan
program*

- Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh program perlindungan sosial , dengan bekerja sama dengan penyelenggara program
- Memberi dukungan teknis kepada pengguna Basis Data Terpadu

2

Melakukan riset

- Memastikan kesahihan berbagai studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Basis Data Terpadu

3

*Membangun
sistem
informasi*

- Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologi informasi
- Penyajian beragam informasi dari basis data terpadu melalui media berbasis teknologi informasi

Penggunaan Basis Data Terpadu

3 Jenis Data yang Tersedia

Data individu
DENGAN
nama dan alamat

- Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial.
- Pengguna: kementerian/lembaga pelaksana program baik pusat maupun daerah.
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi tentang deskripsi dan sasaran program – dapat berdiskusi dengan staf teknis TNP2K.

Data individu **TANPA**
nama dan alamat

- Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun daerah.
- Pengguna: Pemerintah pusat & daerah, lembaga penelitian, NGO, dll.
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna.

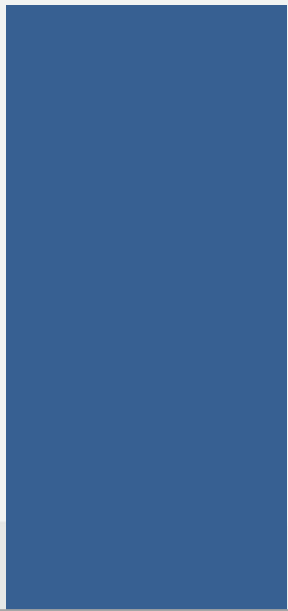
Data agregat/distribusi
tingkat kecamatan

- Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- Dapat diakses melalui website TNP2K.

Pengayaan Informasi BDT

Hasil Sinkronisasi BDT dan Basis Data SIAK

96.749.760



Jumlah Data BDT

83.238.293



Data BDT yang Cocok dengan Data Adminduk

86%

- BDT telah dilengkapi dengan informasi **Basis Data Sistem Informasi Adminduk (SIAK)**. Informasi tersebut antara lain:
 - Nama Lengkap
 - NIK dan Nomor Kartu Keluarga
 - Alamat lengkap
 - Tanggal lahir
 - Agama
 - Pekerjaan
 - Dan lain-lain
- Pemutakhiran informasi wilayah **(dari 497 menjadi 514 kab/kota)**

Koordinasi dan Sinkronisasi **BDT** dan **Basis Data**

SIAK



**Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan
(SIAK)**

**Basis
Data
Terpadu
(BDT)**



**Sistem Registrasi Tunggal
Program Perlindungan Sosial Terpadu**

**Berisi Data Nama, Alamat, Karakteristik Sosial Ekonomi,
NIK, KK, Sidik Jari, Iris Mata, & Data Kependudukan**

Lainnya

JKN

PKH

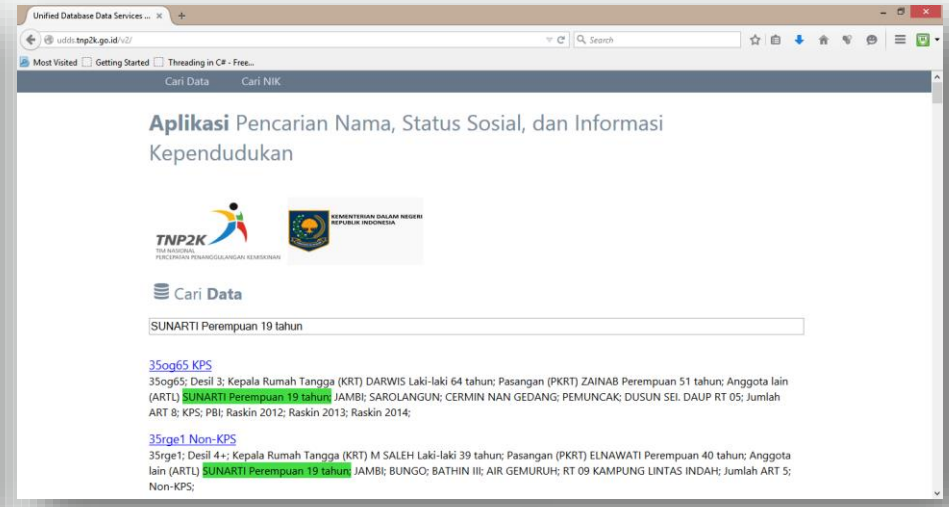
BSM

Raskin

BLSM/SK

Program
Lain

Aplikasi Pencarian Nama, Status Sosial, dan Informasi Kependudukan



1

2



3



Nama Kepala Keluarga

Ijo

Desil kesejahteraan : 1

Tingkat pendidikan : Tidak bersekolah

Pekerjaan: Tidak Bekerja

Peserta BPJS PBI: Ya

- **Tempat/Tanggal Lahir** : Depok 10/12/1932
- **NIK** : 3171061012320001
- **No. Kartu Keluarga** : 3171060701091802
- **No. KKS** : 373INS10310A05
- **Kode wilayah** : 3173020001

- **Provinsi** : DKI Jakarta
- **Kabupaten** : Kota Jakarta Pusat
- **Kecamatan** : Menteng
- **Desa** : Menteng
- **Alamat** : Jalan Menteng Jaya RT 001/RW 08

Sidik Jari: ✓ | Iris Mata: ✓ | Ketunggalan: ✓

ANGGOTA KELUARGA

• **Memeh (NIK: 3171066406440002)** lahir di Tasikmalaya, 24/6/1944
Istri, 70 tahun, menikah, tidak/belum pernah bersekolah, Peserta BPJS PBI

• **Idawati (NIK: 3171064205690003)** lahir di Jakarta, 2/5/1969
Anak, 45 tahun, cerai mati, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI

• **Adam Noval (NIK: 3171061506910001)** lahir di Jakarta ,15/6/1991
Cucu, 23 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI, Buruh

• **Dwi Fadli (NIK: 3171061809960004)** lahir di Jakarta, 18/9/1996
Cucu, 18 tahun, belum menikah, SMP, Peserta BPJS PBI

• **Natasha Caroline (NIK: 3171066808020003)** lahir di Jakarta, 28/8/2002
Cucu, 12 tahun, belum menikah, SD , Peserta BPJS PBI

KONDISI RUMAH TINGGAL

- **Kepemilikan rumah** : Rumah sendiri
- **Tipe dinding** : Tembok
- **Kualitas dinding** : Jelek
- **Jenis atap** : Genteng
- **Kualitas atap** : Jelek
- **Sumber air minum** : Sumur bor/pompa
- **Cara memperoleh air minum** : Tidak membeli
- **Penerangan utama** : Listrik PLN
- **Source cooking fuel** : Minyak tanah
- **Sanitasi/tempat BAB** : Sendiri

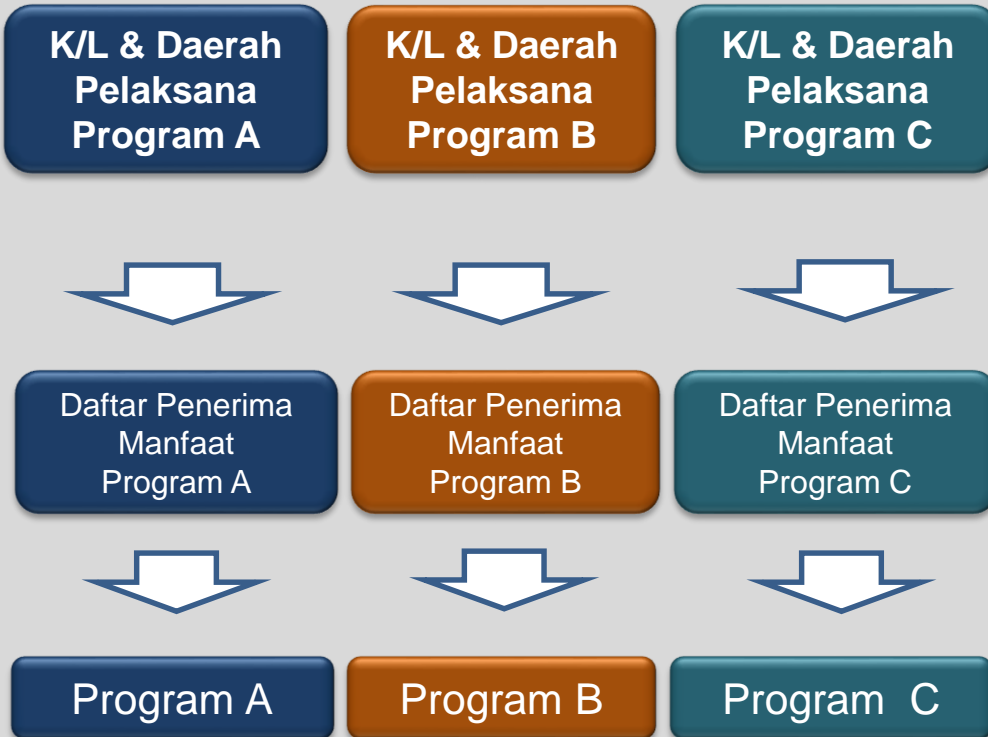
KEPEMILIKAN ASET

- **Mobil** : Tidak punya
- **Sepeda motor** : Tidak punya
- **Lemari es** : Tidak punya
- **Tabung gas 12 kg** : Tidak punya
- **HP dalam rumah tangga** : Tidak punya

Pemanfaatan Basis Data Terpadu

Pendekatan Pemanfaatan Basis Data Penetapan Sasaran Program

Sebelumnya*



* Setiap K/L pelaksana program memiliki daftar penerima manfaat tersendiri

Saat Ini**



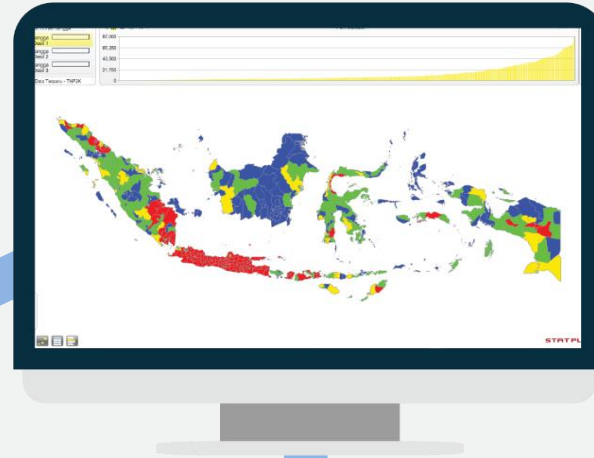
**sumber data tunggal untuk mengidentifikasi kepesertaan program berdasarkan kriteria spesifik dari pelaksana program

“Pemanfaatan BDT mendorong penciptaan komplementaritas antar program perlindungan sosial”

Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT)

<http://bdt.tnp2k.go.id>

BDT merupakan bagian dari Open Government Indonesia



Daftar nama dan alamat



Masyarakat luas

56

Permintaan dari
21 Kementerian dan
Lembaga

65

Permintaan dari
31 Provinsi

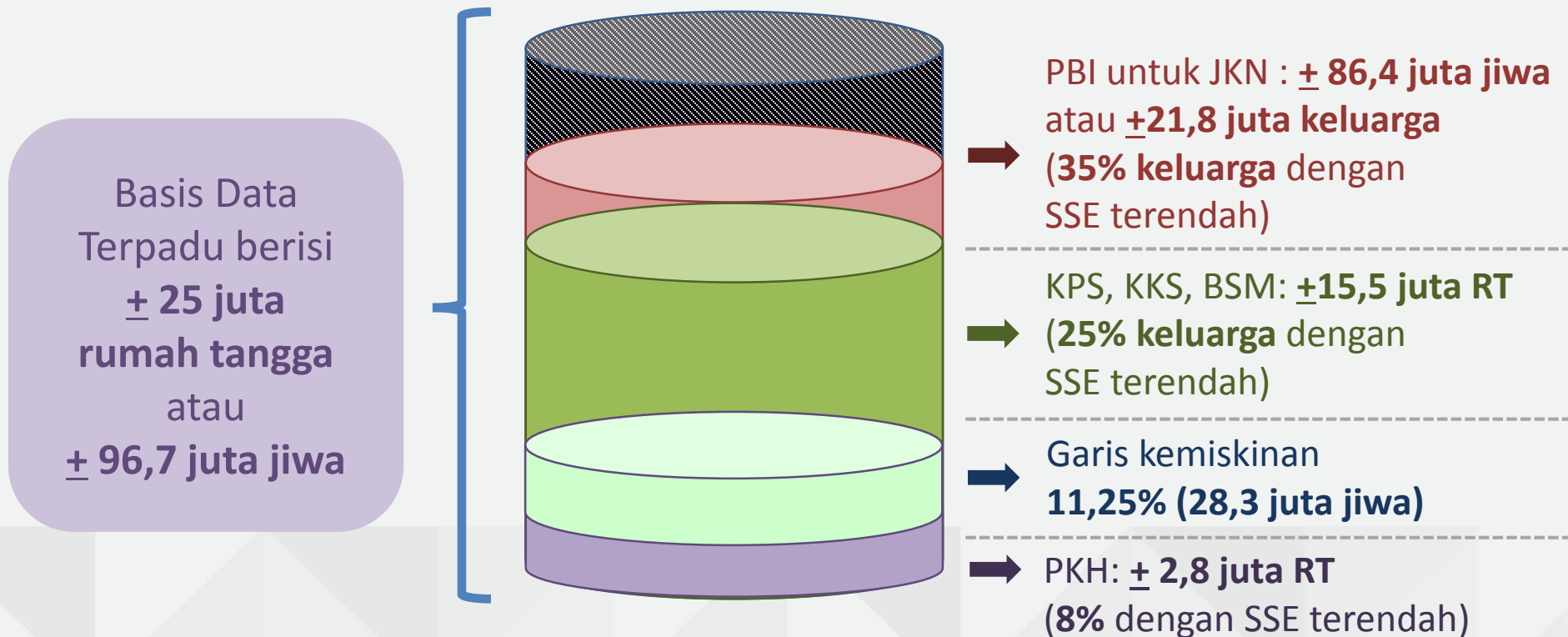
513

Permintaan dari
308 Kabupaten/Kota

**Persyaratan Utama Pemanfaatan BDT:
Data tidak untuk kepentingan politik dan komersial**

Basis Data Terpadu (BDT) Sebagai Sumber Data Tunggal Program Perlindungan Sosial

40% keluarga dengan status sosial ekonomi (SSE) terendah



“Keluarga diurutkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi”

Kartu Perlindungan Sosial



Diberikan kepada **25% rumah tangga** dengan status sosial ekonomi terendah atau **15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan** dan berlaku sampai dengan **Desember 2014**

RUMAH TANGGA MANA YANG LEBIH BERHAK MENERIMA KPS?



Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, dan memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.

Jenis Kartu & Jumlah Kartu *

Tahap Awal (November & Desember 2014)



1.030.028



1.030.028

157.943



4.451.508

Mekanisme Simpanan Keluarga Sejahtera Tahap Awal (November & Desember 2014)



Disertai pembagian:

- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggantikan KPS
- SIM card berisi *e-money*
- Kartu Indonesia Pintar
- Kartu Indonesia Sehat



Tetap menggunakan Kartu Perlindungan Sosial dan mendapatkan manfaat:

- Program Indonesia Pintar
- Program Indonesia Sehat



Mekanisme Perubahan Interim

PPLS 2011



KPS 2013



KKS 2014



PBDT 2015



Musdes/Muskel



Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 54/3150/SJ

Tentang pelaksanaan pembagian **Kartu Perlindungan Sosial (KPS)** dan **Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Hasil Perubahan Melalui Musdes/Muskel

402.000



2013

33.000



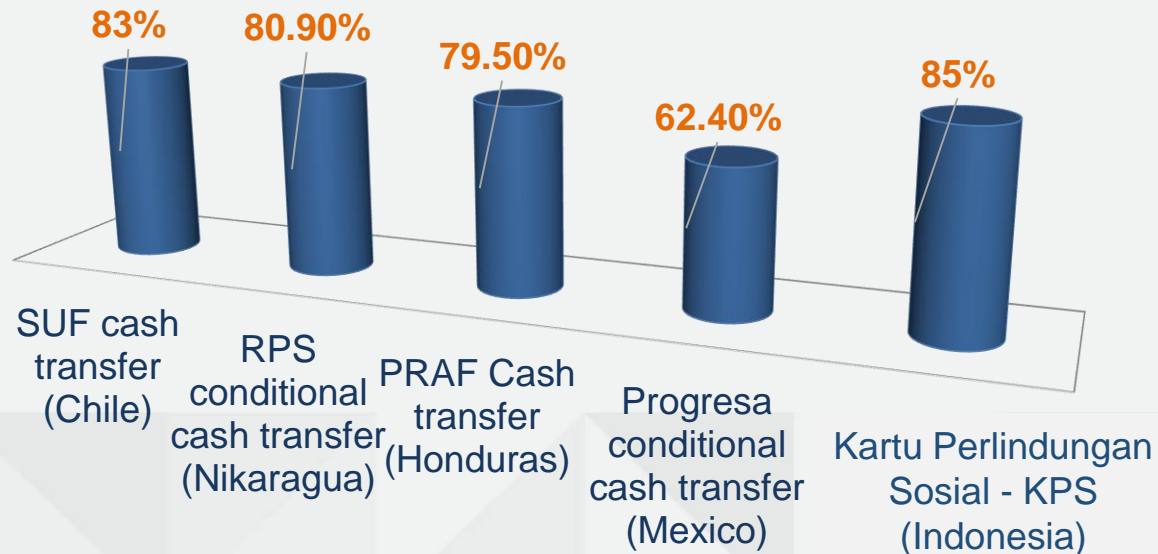
2014

Ringkasan Deskripsi Pemanfaatan Basis Data

Program	Jumlah			Pelaksana	Keterangan
	Keluarga	Jiwa	Kelompok		
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	15,5 Juta	65,6 Juta	25 % terbawah	Kementerian Sosial	Diberikan kepada keluarga sebagai penanda keluarga kurang mampu
Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS)	15,5 Juta	65,6 Juta	25 % terbawah	Kementerian Sosial	Diberikan Kepada Keluarga
Raskin	15,5 Juta	65,6 Juta	25 % terbawah	Kementerian Sosial	Diberikan Kepada Keluarga
Program Keluarga Harapan	2,8 Juta	11,2 juta	8 % terbawah	Kementerian Sosial	Diberikan kepada keluarga
Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)	15,5 Juta	11.1 juta Siswa	25 % terbawah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Kementerian Agama	Diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga penerima KPS/KKS.
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	21,8 Juta	86,4 Juta	35 % terbawah	Kementerian Kesehatan melalui BPJS Kesehatan	Diberikan kepada setiap anggota keluarga 35 % terbawah
Program Daerah	Terdapat 65 permintaan dari 31 Provinsi dan 513 permintaan dari 308 kabupaten/kota untuk menggunakan BDT dalam pelaksanaan Program Perlindungan Sosial yang dibiayai oleh APBD di daerah masing-masing.				
Program Kementerian/Lembaga lainnya	Terdapat 56 permintaan dari 21 Kementerian /Lembaga untuk menggunakan BDT dalam pelaksanaan Program Perlindungan Sosial lainnya.				

Pengalaman Internasional Terkait Dengan Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga

Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah di beberapa Negara

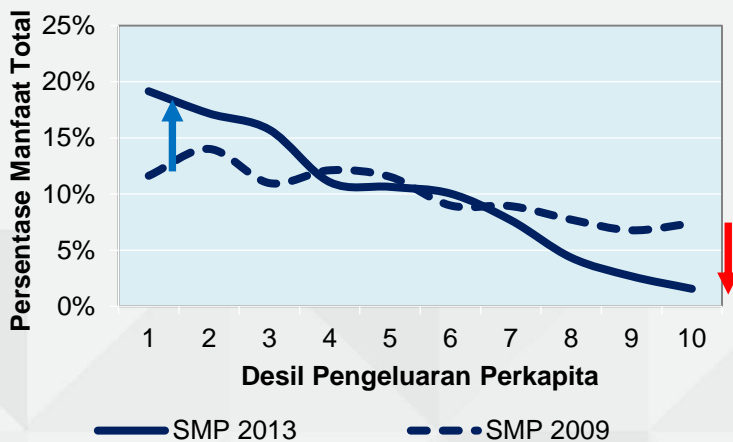
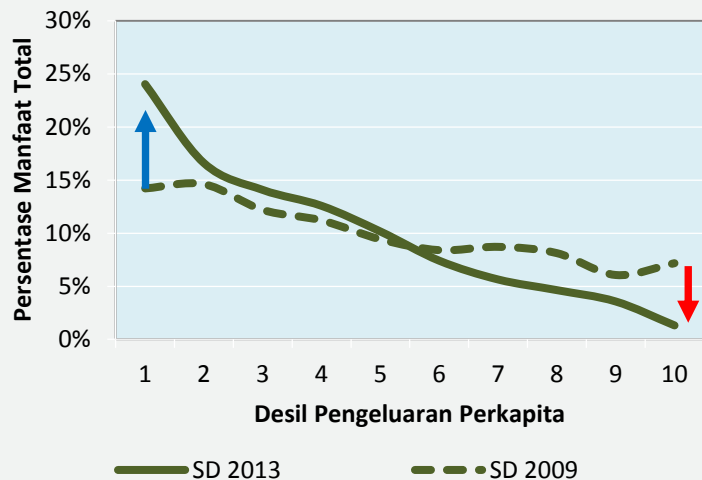


Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014

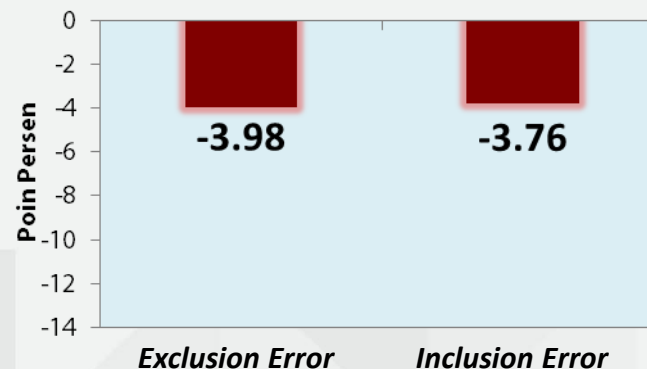
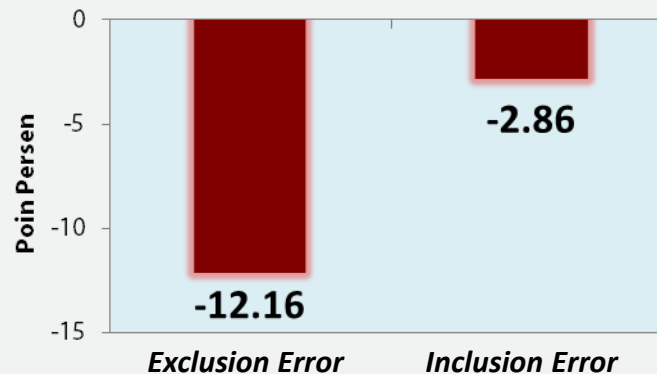
Dampak Penggunaan BDT Untuk Penetapan Sasaran

Penggunaan Sejak 2012, Memperbaiki Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial Bidang Pendidikan

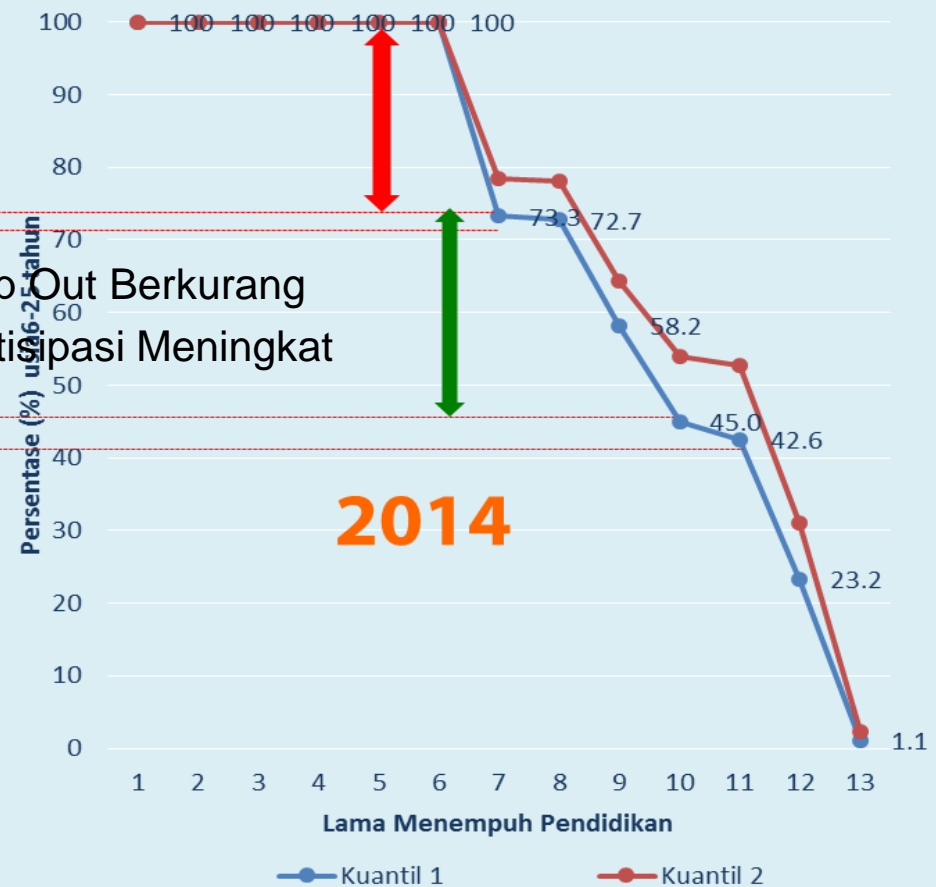
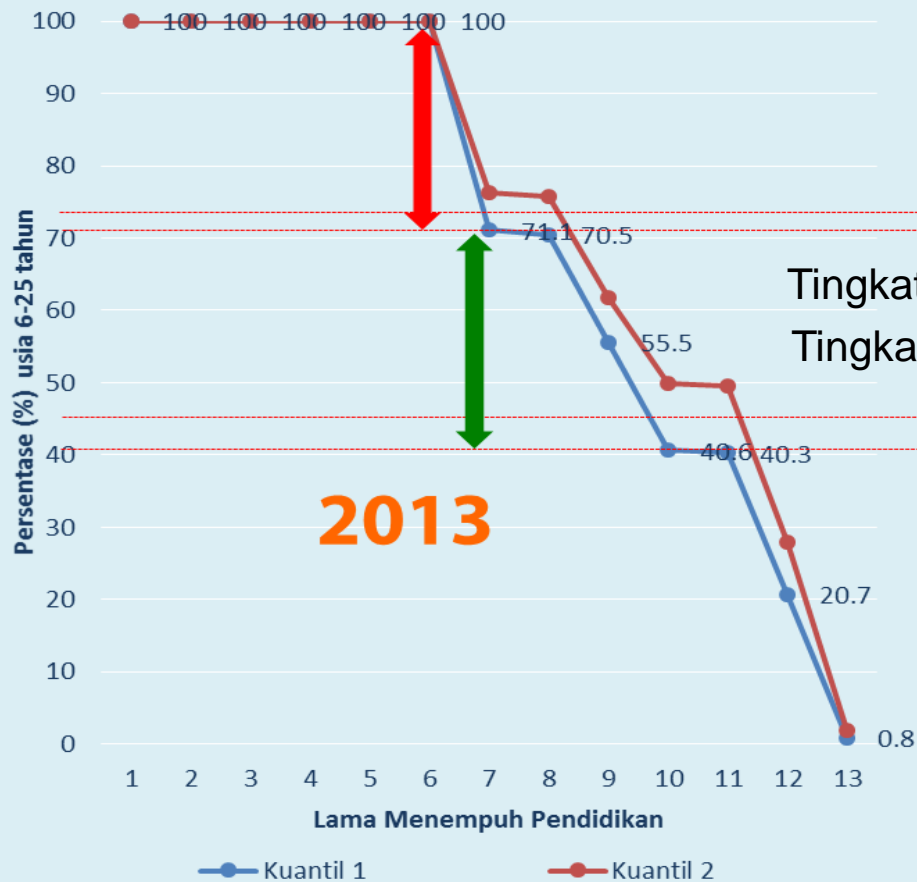
Ketepatan Sasaran BSM Mengalami Perbaikan Kesalahan Penentuan Sasaran Berkurang



Sumber: Susenas, 2009 dan 2013



Keberlanjutan Pendidikan Anak Usia Sekolah Pada Rumah Tangga 40% Terbawah

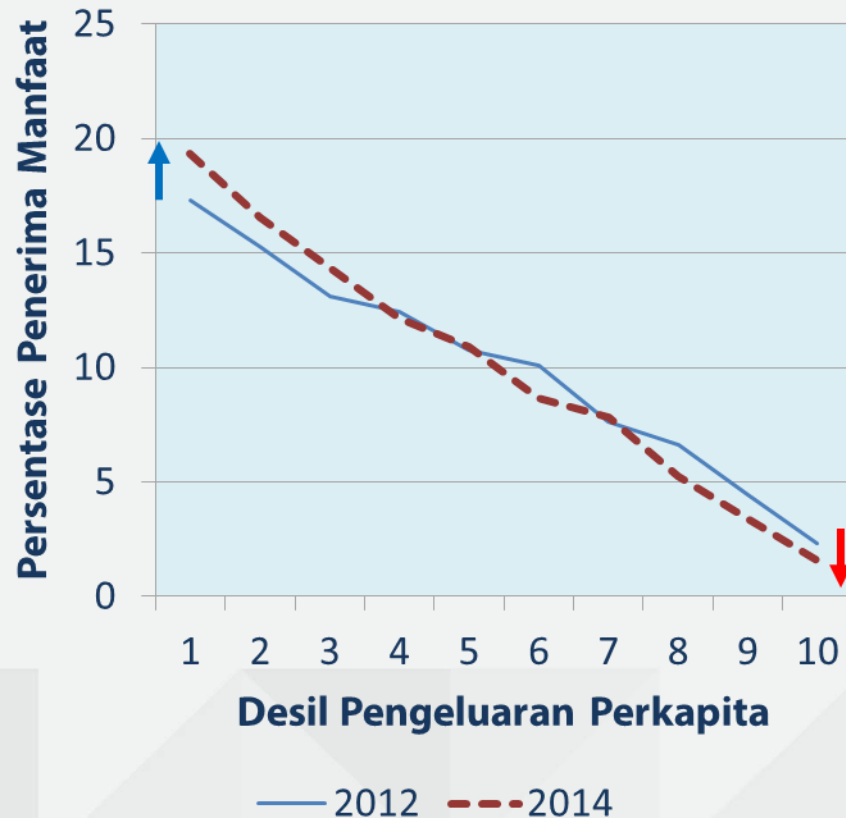


Tingkat Drop Out Berkurang
Tingkat Partisipasi Meningkatkan

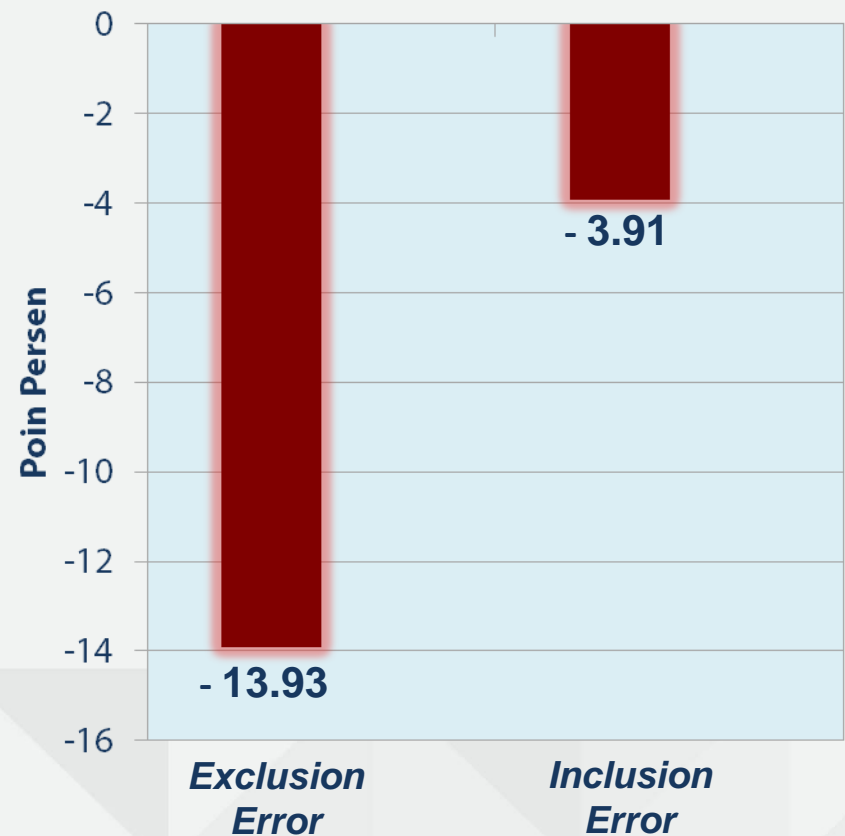
Sumber: Analisis data Susenas Maret 2013 dan Maret 2014

Penggunaan BDT Sejak 2012, Memperbaiki Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan

Ketepatan Sasaran Jamkesmas Mengalami Perbaikan



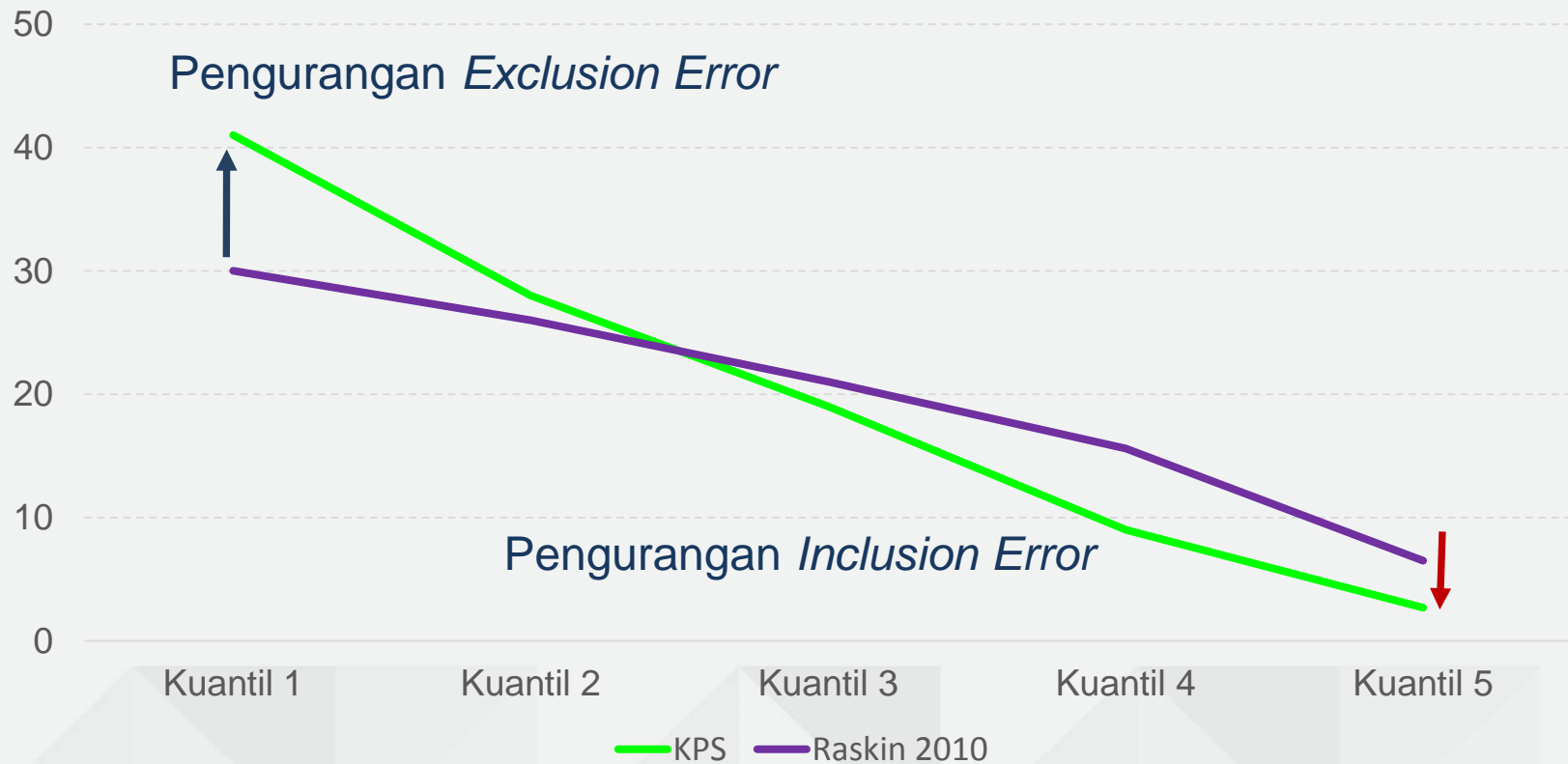
Kesalahan Penentuan Sasaran Berkurang



Sumber: Susenas, 2012 dan 2014

Perbaikan Kinerja Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial Lainnya

Kinerja Penargetan Program dengan Menggunakan KPS



Sumber:: Susenas 2010 (Raskin) dan Desember 2013 (KPS)

“Pemutakhiran BDT sangat penting untuk meningkatkan ketepatan program perlindungan sosial bersasaran di masa depan”

Langkah Strategis Ke Depan

Penyempurnaan Sistem Penetapan Sasaran



Sistem Informasi
Administrasi
Kependudukan
(SIAM)

Basis Data
Terpadu
(BDT)



Sistem
Informasi
Kesejahteraan
Sosial
(KEMENSOS)



Sistem Registrasi Tunggal Program Perlindungan Sosial

Berisi Data yang telah **divalidasi dan diverifikasi** yang meliputi Nama, Alamat, Karakteristik Sosial Ekonomi, NIK, KK, Sidik Jari, Iris Mata, Data Kependudukan Lainnya, dan **Data PMKS**.

JKN

PKH

BSM

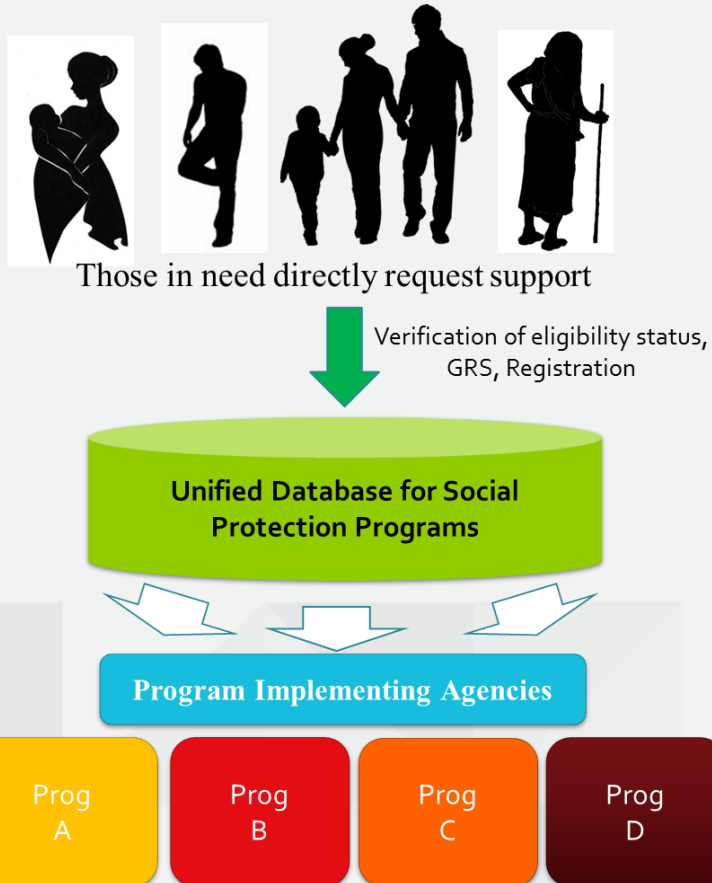
Raskin

BLSM/SKS

Program
Lain

Pengembangan Sistem Registrasi Tunggal Program Perlindungan Sosial

Mengupayakan Pemutakhiran BDT dalam skala nasional saat ini merupakan kegiatan terakhir.



Sumber: TNP2K (2015)

Usulan Pengembangan Sistem Registrasi Tunggal untuk Program Perlindungan Sosial:

- Pemutakhiran Kepesertaan Program dalam skala kecil melalui konsultasi publik di tingkat desa/kelurahan
- Menjangkau rumah tangga dan individu rentan dalam status PMKS non BDT
- Membuka kemungkinan penggunaan sistem pendaftaran kepesertaan secara individual
- Verifikasi dan validasi hasil pemutakhiran oleh pengelola BDT dan SIAK
- Penetapan calon kepesertaan program melalui konsultasi publik dengan input hasil pengolahan BDT dan SIAK
- BDT menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat

Diawali dengan Integrasi Proses Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015



Peran Penting Forum Konsultasi Publik (FKP) Dalam Pemutakhiran BDT



- 1 Mengakomodasi usulan masyarakat untuk menyempurnakan ketepatan sasaran BDT
- 2 Meningkatkan peran serta dan keterlibatan pemerintah daerah
- 3 Menyempurnakan ketepatan sasaran BDT melalui peningkatan cakupan pendataan dan perangkingan

Hasil dari Pilot Konsultasi Publik TNP2K:

- Pemerintah daerah dan masyarakat antusias berpartisipasi
- Pemutakhiran daftar awal menjadi isu utama, terutama:
 - ✓ Penjangkauan rumah tangga miskin yang belum terdaftar (*Exclusion Error*)
 - ✓ Penandaan rumah tangga kaya yang terdaftar (*Inclusion Error*)
 - ✓ Kriteria tetap dan mudah dipahami dalam usulan penambahan (*exclusion error*):

“ usulan tambahan rumah tangga dapat prioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga: keterbatasan fisik/mental; berpenyakit kronis; beban ketergantungan tinggi”

Peran Penting Pemerintah Daerah Dalam Pemutakhiran BDT

1

Tahap penyusunan daftar rumah tangga sasaran pendataan melalui FKP

- Pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPS dalam pelaksanaan FKP di wilayah masing-masing.
- Membentuk unit kerja pemutakhiran basis data terpadu yang melakukan supervisi, koordinasi, sosialisasi dan advokasi kepada jajaran pemerintahan di bawahnya
- Memastikan satuan lingkungan terkecil (RT/RW/Dusun) menerima daftar rumah tangga sementara dan memastikan terselenggaranya FKP di masing-masing wilayah tersebut.
- Memastikan rumah tangga miskin yang belum terdaftar dapat terakomodasi melalui proses FKP diwilayahnya (meminimalkan *exclusion error*)
- Menetapkan daftar rumah tangga hasil FKP melalui berita acara pelaksanaan dan mengirimkan daftar tersebut ke unit kerja di atasnya.

2

Tahap pendataan rumah tangga hasil FKP

- Pengawasan dalam proses pelaksanaan pendataan bersama melalui unit kerja pemutakhiran basis data terpadu.
- Menetapkan daftar rumah tangga hasil pendataan.
- Dapat merekomendasikan tenaga pencacah lapangan dan petugas monitoring lapangan.

Dukungan Untuk Kegiatan Pemutakhiran BDT

- Penyiapan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)-**Surat Edaran Nomor 460/225/SJ Tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (PBDT/PPLS) 2015**
- Penyiapan Surat Edaran TNP2K kepada TKPK untuk mendorong peran aktif dalam pelaksanaan Pemutakhiran BDT di wilayah masing-masing.-**Surat Nomor B- 170/Setwapres/D-3/TNP2K.03.04/05/2015 Tentang Informasi Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015**
- Berkoordinasi untuk mengawal pelaksanaan Pemutakhiran BDT bersama dengan Tim Pengarah Pemutakhiran BDT yang beranggotakan lintas kementerian/lembaga, diantaranya:
 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - Kementerian Dalam Negeri
 - Kementerian Keuangan
 - Kementerian Sosial
 - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

- **Surat Edaran Kemendagri Nomor 460/225/SJ Tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (PBDT/PPLS) 2015**
 1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan Berpartisipasi aktif untuk mendukung Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) dan pemutakhiran informasi rumah tangga di tingkat desa atau kelurahan
 2. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk mendukung dan memastikan keamanan serta kelancaran pelaksanaan PBDT 2015
 3. Melakukan Nota Kesepahaman (MoU)/ berita acara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan bekerjasama dengan BPS Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengenai hasil konsultasi public dan PBDT/PPLS 2015 untuk mendukung proses kelancaran pelaksanaan PBDT 2015
 4. Mengusulkan jumlah dan distribusi alokasi rumah tangga penerima manfaat program bantuan untuk pemutakhiran data PPLS 2015
 5. Mengawal partisipasi masyarakat dalam kegiatan konsultasi dan pendataan PBDT/PPLS 2015
 6. Informasi lebih lanjut secara teknis terkait pelaksanaan PBDT 2015 akan disampaikan secara terpisah melalui surat Sekretaris Eksekutif TNP2K

Surat Sekretaris Eksekutif TNP2K B-170/Setwapres/D-3/TNP2K.03.04/04/2015 tertanggal 6 Mei 2015 mengenai Informasi Teknis Pelaksanaan Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015.

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan berpartisipasi aktif guna mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) yang dilakukan di tingkat desa atau kelurahan dan pemutakhiran informasi rumah tangga yang akan dilaksanakan pada Mei-Juli 2015.
2. Menugaskan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk memastikan dan memantau pelaksanaan PBDT 2015.
3. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat guna memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan PBDT 2015.
4. Bekerjasama dengan Kepala BPS Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk mendukung proses pelaksanaan PBDT 2015.

Dukungan Gubernur

1. Menugaskan Wakil Gubernur dan Kepala Bappeda selaku Ketua dan Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan PBDT 2015.
2. Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi untuk memastikan kelancaran proses PBDT 2015.
3. Memastikan keseluruhan proses pelaksanaan PBDT 2015 yang terdiri dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan pemutakhiran informasi rumah tangga di tingkat kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dan lancar; Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan dengan memanfaatkan data dari Dirjen Administrasi Kependudukan.
4. Memperoleh laporan dari BPS Provinsi berupa data rekapitulasi (manual) hasil sementara dari FKP.
5. Melaporkan hasil rekapitulasi pada butir (d), di atas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan tembusan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dukungan Bupati dan Walikota

1. Menugaskan Wakil Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda selaku Ketua dan Sekretaris
2. TKPK Kabupaten/Kota untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan PBDT 2015.
3. Berkoordinasi dengan Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk memastikan kelancaran proses PBDT 2015.
4. Memastikan keseluruhan proses pelaksanaan PBDT2015 yang terdiri atas pelaksanaan FKP di tingkat desa/kelurahan dan pemutakhiran informasi rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan lancar, khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan dengan memanfaatkan data dari Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
5. Memperoleh laporan dari BPS Kabupaten/Kota berupa data rekapitulasi (manual) hasil sementara FKP.
6. Melaporkan hasil rekapitulasi pada butir (d), di atas kepada Gubernur melalui Ketua TKPK Provinsi.
7. Menginstruksikan kepada Camat untuk:
8. Menginstruksikan kepada Kepala Desa dan Lurah untuk:.....

Dukungan Camat

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dalam menyukseskan pelaksanaan PBDT.
2. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) BPS untuk memastikan proses pelaksanaan FKP dan pemutakhiran informasi rumah tangga di wilayahnya sehingga berjalan sesuai dengan rencana.
3. **Menandatangani berita acara** pengesahan rekapitulasi (manual) hasil sementara FKP. Berita acara ditandatangani bersama Kepala BPS Kabupaten/Kota dan **Camat mewakili Bupati/Walikota**.
4. Melaporkan hasil rekapitulasi pada butir (3), kepada Bupati/Walikota melalui Ketua TKPK Kabupaten/Kota.

Dukungan Kepala Desa/Lurah

1. Memfasilitasi pelaksanaan FKP di wilayah masing-masing.
2. Melakukan koordinasi dengan Ketua RW, Ketua RT, dan Kepala Dusun setempat untuk menyukseskan pelaksanaan PBDT 2015.
3. Bekerjasama dengan pendamping dan KSK untuk mendukung kelancaran pelaksanaan FKP di wilayah masing-masing.
4. Membentuk dan atau mengaktifkan kembali Pos Pengaduan Masyarakat (Posdumas) sebagai komponen sistem pelayanan berkelanjutan.
5. Mensosialisasikan pelaksanaan FKP kepada jajaran pemerintahan di bawahnya (RW/RT/Dusun dan jenjang sejenis).
6. Melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan FKP dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
7. Memastikan seluruh rumah tangga miskin dan tidak mampu di wilayah masing-masing telah tercatat dalam hasil FKP.
8. Menandatangani Berita Acara pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Terima Kasih